Kajian atas Standar Pelaporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat : Komparasi Antara PSAK No. 31, SAK ETAP, dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat

JRAK
1,2

141

Ahmad Waluyo Jati, Eny Suprpti,
Satria Budi Wicaksono

*Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur
Email: satriawicaksono48@yahoo.com*

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe Rural Bank's financial reporting based on PSAK No.31 and SAK ETAP then describe the comparison between the Rural Bank of PSAK No. 31, SAK ETAP and Accounting Manual of Rural Banks (BPR PA). In this research, the author uses PSAK No.31, SAK ETAP and Accounting Manual of Rural Banks (BPR PA) as the unit of analysis.

In PSAK No.31 provision is recognized as a liability, while at the SAK ETAP in accordance with accounting guidelines Rural Banks (BPR PA) is recognized as a reduction of asset loans. At SAK ETAP also lost the deferred tax expense, and be an advanced standard of one step compared to PSAK because there was no fundamental error and extraordinary gain or loss.

While in terms of measurement, the two standards had been worth it, only SAK ETAP is a standard that is more simple with the simplicity of measurement and reduce the disclosure. The financial statements are also presented based on the characteristics and order of liquidity. In the SAK ETAP presentation of financial statements was not described in detail, requiring the accounting guidelines of Rural Banks (BPR PA) as a companion, so the information was presented in a transparent, accurate, and reliable.

Keywords : PSAK No. 31, SAK ETAP, Accounting Manual of Rural Banks (BPR PA), recognition, measurement, presentation, disclosure.

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 19 Mei 2009 telah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Hal utama yang mendasari pengesahan SAK ETAP yaitu adanya konvergensi standar akuntansi keuangan dengan IFRS, sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih kompleks dan banyak menggunakan *fair value* dan *professional judgment*. Kondisi demikian cukup menyulitkan bagi sebagian besar perusahaan di Indonesia, terutama bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Penerbitan SAK ETAP ini diharapkan dapat membantu perusahaan kecil dan menengah terkait dengan penyajian laporan keuangan yang relevan dan andal.

Sasaran dari SAK ETAP ini yaitu entitas bisnis yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pihak eksternal. Entitas yang mempunyai tanggung jawab publik juga dapat menggunakan SAK ETAP apabila entitas

Jurnal Reviu Akuntansi
dan Keuangan
ISSN: 2088-0685
Vol.1 No. 2, Oktober 2011
Pp 141-150

tersebut telah memperoleh ijin dari pihak regulator. Misalnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP sejak tanggal 1 Januari 2010 berdasarkan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-Undang Perbankan adalah bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana. Keterbatasan ini diberikan kepada BPR terkait dengan tujuan pelayanan utama BPR kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar. Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan BPR dalam pelaporan keuangan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 mengenai Akuntansi Perbankan. PSAK No. 31 tersebut bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan bank. PSAK No. 31 ini diterapkan untuk perbankan yang beroperasi di Indonesia, bagi bank perkreditan rakyat dan lembaga/badan lain yang menjalankan satu kegiatan perbankan atau lebih. Sebaliknya, pernyataan ini tidak mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi khusus pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pedoman Akuntansi BPR merupakan penjabaran lebih lanjut prinsip dan substansi pengaturan dalam SAK ETAP untuk membantu BPR dalam menyusun laporan keuangan. PA BPR bertujuan untuk memberikan acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menyusun laporan keuangannya. Disamping itu, PA BPR juga bertujuan untuk menciptakan keseragaman perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi unik pada BPR dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di antara BPR, terutama daya bandingnya. Proses penyusunan Pedoman Akuntansi BPR yang melibatkan regulator, akuntan, dan praktisi telah melalui proses yang lazim dalam penyusunan suatu pedoman akuntansi (*due process procedure*), termasuk public hearing dan limited hearing. Untuk itu, bagi BPR ditetapkan penggunaan standar akuntansi keuangan yang sederhana yaitu Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang telah diberlakukan bagi BPR sejak 1 Januari 2010.

Rahayu (2010) di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan mengenai pengakuan aset dan kewajiban antara IFRS dan SAK Indonesia dalam hal pelaporan keuangan industri perbankan, perbedaan hanya terjadi pada pengakuan nilai jaminan. Sedangkan dalam hal pengukuran, kedua standar telah sepadan dengan aset dan kewajiban diukur pada nilai wajar. Laporan keuangan juga disajikan berdasarkan karakteristik dan urutan likuiditasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran (SE) NO.11/37/DKBU/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), atau The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011.

Penggunaan SAK ETAP ini sifatnya mandatory dalam rangka akuntabilitas pelaporan keuangan BPR. Untuk itu, jika pada tahun buku 2011 BPR belum menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan keuangannya, maka laporan keuangan BPR yang bersangkutan terancam dinilai sebagai laporan keuangan yang tidak wajar dalam laporan akuntan independen. Penugasan audit tahun buku 2011 tentunya mengacu pada kriteria SAK ETAP sehingga dampak laporan keuangan auditor dengan opini tidak wajar tentunya sangat merugikan BPR (Bali Post, 26 April 2011).

Sehingga, pada penelitian ini dilakukan komparasi antara PSAK No. 31, SAK ETAP, dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA_BPR) mengenai laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diwajibkan membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*studi literature*) yang mengacu kepada produk Dewan Standart Akuntansi Keuangan berupa Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK No. 31 revised 2009), Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) tentang pelaporan keuangan bank perkreditan rakyat.

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah: (1) Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No 31 revised 2009 tentang pelaporan keuangan khusus perbankan, (2) Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tentang pelaporan keuangan khusus entitas-entitas tanpa akuntabilitas publik dan PA BPR yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan BPR.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh berdasarkan sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan literatur-literatur yang mendukung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No 31 yang diperoleh dari IAI, SAK ETAP yang diperoleh dari IAI dan seminar sosialisasi ETAP, dan PA-BPR 2010 yang diperoleh dari KAP Supriadi dan rekan.

Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis komparatif kualitatif yang meliputi:

1. Mengidentifikasi penyajian laporan keuangan BPR menurut PSAK No. 31(revised 2009).
2. Mengidentifikasi penyajian laporan keuangan BPR menurut SAK ETAP.
3. Mengkomparasi antara 1 dan 2 dengan tujuan untuk menilai penyajian laporan keuangan BPR.
4. Mengimpretasikan hasil analisis dan kemudian membuat simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparasi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 31 disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehubungan dengan pelaporan keuangan industri perbankan yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan bank. PSAK 31 ini diterapkan untuk perbankan yang beroperasi di Indonesia, bagi bank perkreditan rakyat dan lembaga/badan lain yang menjalankan satu kegiatan perbankan atau lebih.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-Undang Perbankan adalah bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana. Keterbatasan ini diberikan kepada BPR terkait dengan tujuan pelayanan utama BPR kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Mei 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP adalah PSAK yang disederhanakan dengan pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana dengan penyederhanaan pengukuran dan mengurangi pengungkapan. Disamping itu, SAK ETAP merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan (*stand alone*), yang artinya hanya mengacu pada buku SAK ETAP itu sendiri tidak mengacu pada PSAK kecuali pada transaksi yang belum di atur dalam SAK ETAP.

Kesederhanaan SAK ETAP ini dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang tujuan dari laporan keuangannya adalah karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan,

Tabel 1: Analisis Komparasi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, Standart Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR)

materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini PSAK No. 31 akan dikomparasikan dengan SAK ETAP, karena pelaporan keuangan industri perbankan terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan, maka analisis dalam penelitian inipun difokuskan pada keempat point tersebut, Sebagai berikut :

Jenis	PSAK No 31	ETAP	PA BPR	Keterangan
Pengakuan	<p>Diatur dalam SAK 55:</p> <p>14) entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat paragraf 38 yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan yang lazim)"</p> <p>20) pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aset produktif lain yang <i>nonperforming</i>. Pendapatan bunga dari kredit dan aset produktif lain yang <i>nonperforming</i> diakui pada saat pendapatan tersebut diterima</p> <p>27) beban bunga diakui secara akrual.</p>	<p>ETAP 2</p> <p>34) Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.</p> <p>35) Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.</p> <p>20.27(a) pendapatan bunga harus diakui secara akrual</p> <p>1. Kredit yang termasuk kategori <i>performing</i> diakui secara akrual.</p> <p>2. Kredit yang termasuk kategori <i>non-performing</i> diakui secara kas.</p>	<p>PA BPR</p> <p>Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah, dan <i>cash back</i>, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana</p>	<p>Sesuai:</p> <p>Aset dan kewajiban diakui dalam neraca pada saat mengandung manfaat ekonomi yang dapat diukur dengan andal. Namun hal ini tidak dijelaskan dalam PSAK 31 melainkan dalam PSAK 55</p>
	<p>37) agunan kredit yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi</p> <p>39) selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.</p>	<p>Diatur dalam ETAP:</p> <p>20.26) Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen atas dasar yang ditetapkan dalam paragraf 20.27 ketika:</p> <p>1. ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas; dan</p> <p>2. jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.</p>	<p>Diatur dalam PA BPR:</p> <p>1. Pada saat pengakuan awal, Agunan Yang Diambil Alih dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu maksimum sebesar kewajiban debitor. BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.</p> <p>2. Setelah pengakuan awal, Agunan Yang Diambil Alih dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.</p> <p>3. Apabila Agunan Yang Diambil Alih mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut.</p> <p>4. Apabila Agunan Yang Diambil Alih mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.</p> <p>5. Agunan Yang Diambil Alih tidak disusutkan.</p> <p>Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat Agunan Yang Diambil Alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional.</p>	<p>Sesuai:</p> <p>Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi.</p>

Jenis	PSAK No 31	ETAP	PA BPR	Keterangan
Pengukuran	<p>Diatur dalam PSAK 55 ayat 43: "pada saat pengukuran awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya"</p> <p>49) Instrumen derivatif diakui dalam neraca sebagai aset dan kewajiban berdasarkan hak atau kewajiban menurut perjanjian. Seluruh instrumen derivatif harus disajikan dengan nilai wajar</p> <p>76) produk simpanan dinilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Giro dinilai sebesar kewajiban bank kepada pemegang giro Tabungan dinilai sebesar jumlah kewajiban bank kepada pemilik tabungan Deposito dinilai sebesar jumlah pokok deposito yang tercantum dalam perjanjian antara bank dan pemegang deposito berjangka Sertifikat deposito dinilai sebesar nilai nominal dikurangi saldo bunga dibayar dimuka, selisih antara jumlah tunai yang diterima dan nilai nominal (diskonto) dinilai sebagai bunga dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu sertifikat deposito. 	<p>Pengukuran Awal dari Aset Dan Kewajiban</p> <p>2.30) Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu</p> <p>2.31) Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajarnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya Historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Nilai Wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 		<p>Sesuai:</p> <p>Entitas mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya.</p> <p>Sesuai:</p> <p>Dasar mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan pada biaya historis dan nilai wajarnya.</p>
Penyajian laporan keuangan	80) Laporan keuangan bank terdiri atas:	<p>3.12) Laporan keuangan entitas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Neraca Laporan laba rugi Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: <ol style="list-style-type: none"> Seluruh perubahan dalam ekuitas Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi lainnya 		<p>Sesuai:</p> <p>Penyajian laporan keuangan pada umumnya</p>

Jenis	PSAK No 31	ETAP	PA BPR	Keterangan
	<p>Neraca:</p> <p>81) bank menyajikan aset dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya.</p> <p>88) penyisihan kerugian aset produktif yang dibentuk dan disajikan sebagai pos pengurang (<i>offsetting account</i>) dari setiap jenis aset produktif yang bersangkutan.</p>	<p>Neraca:</p> <p>4.1) Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu-akhir periode pelaporan.</p> <p>4.4) Sak ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan</p>		<p>Tidak Sesuai:</p> <p>Sak ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan</p> <p>Namun hal ini diatur lebih lanjut dalam PA BPR</p>
	<p>Laporan Laba Rugi :</p> <p>90) bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang (<i>multiple step</i>) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain.</p>	<p>Laporan Laba Rugi :</p> <p>5.1) laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode</p>		<p>Sesuai:</p> <p>laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode</p>
	<p>Laporan Perubahan Ekuitas</p> <p>100) laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan</p>	<p>Laporan Perubahan Ekuitas</p> <p>6.2) laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut.</p>		<p>Sesuai</p> <p>Entitas menyajikan pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut.</p>
	<p>Laporan Arus Kas</p> <p>102) Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas dan harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan</p> <p>103) kas dan setara kas terdiri atas :</p> <p>a. kas</p> <p>b. giro pada Bank Indonesia</p> <p>c. giro pada bank lain</p>	<p>Laporan Arus Kas</p> <p>7.1) laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.</p>		<p>Sesuai</p> <p>laporan arus kas harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan</p>
Pengungkapan	106) bank harus mengungkapkan analisis aset dan kewajiban menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang terisa, dihitung sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal jatuh tempo	<p>4.12) entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi berikut atas pos disajikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelompok aset tetap Jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya 		<p>Sesuai</p> <p>Entitas mengungkapkan analisis aset dan kewajiban menurut kelompok jatuh temponya</p>

	<p>123) bank harus mengungkapkan jumlah keseluruhan kewajiban yang dijamin, karakteristik, dan nilai tercatat aset yang dijadikan jaminan.</p> <p>116) dalam kaitannya dengan komitmen dan kontinjensi, bank harus mengungkapkan hal-hal berikut:</p> <p>a) karakteristik dan jumlah komitmen untuk menerima dan memberikan kredit yang tidak bisa dibatalkan oleh bank, tanpa menimbulkan sanksi atau beban yang signifikan pada pihak bank. Jumlah komitmen mengungkapkan sebesar sisa komitmen fasilitas pinjaman yang diterima mengungkapkan sebesar sisa fasilitas yang belum digunakan oleh bank. Jumlah komitmen fasilitas kredit yang diberikan mengungkapkan sebesar sisa komitmen mengungkapkan sebesar sisa komitmen yang belum ditarik oleh nasabah.</p> <p>b) Karakteristik dan jumlah komitmen atas:</p> <p>i) penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor sebesar sisa jumlah L/C yang belum direalisasi</p> <p>ii) fasilitas penerbitan efek atau komitmen sejenis lainnya</p> <p>c) Karakteristik dan jumlah kontinjensi yang berhubungan dengan:</p> <p>i) Substitusi kredit langsung, seperti garansi bank, standby L/C, dan risk sharing dalam rangka pemberian kredit</p> <p>ii) Transaksi tertentu (konstruksi dan perdagangan) seperti garansi penawaran, garansi pelaksanaan, garansi uang muka, garansi kepastian, dan standby L/C untuk transaksi</p>		<p>Diatur dalam PA BPR</p> <p>Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan jumlah kredit berdasarkan penggunaan dan sektor ekonomi. 2. Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 3. Kedudukan BPR dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai. 4. Jumlah kredit yang dijamin, besarnya risiko yang ditanggung pihak penjamin, dan pihak penjaminnya. 5. Jumlah kredit <i>channelling</i> dan kredit <i>executing</i>. 6. Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang kredit yang direstrukturisasi selama periode berjalan. 7. Klasifikasi kredit menurut jangka waktu, kualitas dan tingkat bunga kredit yang dihitung secara rata-rata. 8. Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan kredit yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan yang dibentuk selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan dan saldo penyisihan pada akhir tahun. 9. Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan kredit bermasalah. 10. Kebijakan, manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio kredit. 11. Besarnya kredit bermasalah (<i>non-performing loans</i>) dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi dan jenis penggunaan kredit. 12. Saldo kredit yang sudah dihentikan pembebanan bunganya. 13. Agunan yang diambil alih, menurut nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. 14. Ikhtisar kredit yang dihapus buku, yang menunjukkan saldo awal tahun, penghapusbukan kredit dalam tahun berjalan, kredit yang telah dilakukan hapus tagih dan saldo akhir tahun. 	<p>Sesuai</p> <p>Entitas mengungkapkan seluruh kewajiban yang dijamin, karakteristik, dan nilai tercatat aset yang dijadikan jaminan dalam hal perkreditan.</p>
--	---	--	---	---

Jenis	PSAK No 31	ETAP	PA BPR	Keterangan
	<p>tertentu tersebut.</p> <p>iii) Garansi yang diterima dan diterbitkan dalam rangka pemberian atau penerimaan kredit dalam dan luar negeri, kontra garansi dari bank lain, <i>corporate guarantee</i> yang diterima bank dan L/C yang dapat dibatalkan yang masih berjalan</p> <p>iv) Garansi bank atau jaminan yang diterbitkan secara sindikasi sebesar porsi yang dijamin bank bersangkutan</p> <p>v) Perdagangan yang sifatnya berakhir sendiri dan berjangka pendek yang timbul dari pergerakan barang-barang, seperti kredit dokumenter yang timbul ketika barang yang dikirimkan digunakan sebagai jaminan.</p> <p>vi) Pendapatan bunga dalam penyelesaian yang merupakan perhitungan bunga dari aset produktif <i>nonperforming</i> yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan.</p>			
	<p>paragraf 119 menjelaskan, bank harus mengungkapkan konsentrasi yang signifikan dari aset, kewajiban, dan unsur-unsur di luar neraca. Pengungkapan tersebut bisa berdasarkan daerah geografis, kelompok nasabah atau industri, atau konsentrasi risiko lain. Bank juga harus mengungkapkan risiko mata uang asing yang signifikan.</p> <p>Sedangkan tentang perkreditan dijelaskan dalam paragraf 122, bank harus mengungkapkan hal-hal berikut:</p> <p>a) Jenis kredit, sektor ekonomi, dan jumlah</p>	<p>Penyisihan Kerugian Kredit</p> <p>Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:</p> <p>1. Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusbukuan kredit dalam tahun bersangkutan:</p> <p>a. saldo awal tahun (a)</p> <p>b. pembentukan/ pembalikan penyisihan selama tahun berjalan (b)</p> <p>c. penghapusbukuan kredit tahun bersangkutan (c)</p> <p>d. saldo akhir tahun (a) + (b) - (c)</p> <p>2. Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan pengelolaan kredit bermasalah.</p> <p>3. Besaran dan tarif dari masing-masing jenis penyisihan.</p>		<p>Sesuai</p> <p>Entitas mengungkapkan ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusbukuan kredit</p>

<p>kredit masing-masing</p> <p>b) Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa</p> <p>c) Kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai</p> <p>d) Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang kredit yang direstrukturisasi selama periode berjalan</p> <p>e) Klasifikasi kredit menurut jangka waktu, keterlambatan, valuta, dan tingkat bunga kredit yang dihitung secara rata-rata</p> <p>f) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan kredit yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran kredit yang telah dihapusbukukan, dan saldo penyisihan pada akhir tahun</p> <p>g) Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan penanganan kredit bermasalah</p> <p>h) Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum</p> <p>i) Kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio kredit</p> <p>j) Besarnya kredit bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi</p> <p>k) Saldo kredit yang sudah dihentikan pembebanan bunganya</p> <p>hal-hal yang wajib diungkapkan berkaitan dengan instrumen derivatif, baik berupa tagihan derivatif maupun kewajiban derivatif adalah:</p> <p>a) Kebijakan akuntansi, bidang usaha, jumlah dan persentase, serta instrumen derivatif untuk tujuan investasi;</p> <p>b) Karakteristik kuantitatif kegiatan perdagangan dan jenis derivative (124)</p>	<p>Aset tetap dan Inventaris</p> <p>Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:</p> <p>1. Untuk setiap kelompok aset tetap dan inventaris:</p> <p>a. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tetap.</p> <p>b. Metode penyusutan yang digunakan.</p> <p>c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.</p> <p>d. Jumlah bruto aset tetap dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.</p> <p>e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, Rugi penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam laporan laba rugi. Penyusutan, Perubahan lainnya.</p> <p>2. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk utang (jika ada).</p> <p>3. Jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap (jika ada).</p> <p>4. Pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pertukaran aset tetap dalam menentukan substansi komersial.</p> <p>Jenis-Jenis Pendapatan</p> <p>Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:</p> <p>1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.</p> <p>2. Rincian pendapatan bunga yang berasal dari kredit <i>performing</i> dan <i>non-performing</i>, rincian pendapatan operasional lainnya.</p> <p>3. Rincian pendapatan bunga yang berasal dari penyelesaian kredit dengan pengambilalihan agunan.</p> <p>4. Jumlah pendapatan operasional lainnya yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.</p>		
---	--	--	--

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa point-point yang wajib dilaporkan sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum antara lain pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam hal ini PSAK No. 31 dan SAK ETAP sama-sama mensyaratkan hal tersebut. Pada dasarnya tidak ada perbedaan mengenai pengakuan aset dan kewajiban antara kedua standar. Sedangkan dalam hal pengukuran, kedua standar telah sepadan dengan aset dan kewajiban diukur pada nilai wajar. Dalam PSAK No. 31, pengungkapan laporan keuangan belum dijelaskan secara rinci, sehingga diperlukan PSAK 50 dan 55 sebagai pendamping dan penyajian laporan keuangan berdasarkan karakteristik dan urutan likuiditasnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perlakuan akuntansi penyajian laporan keuangan harus terdapat unsur-unsur *identifikasi, measurement, recognition, valuation dan presentasi* agar sebuah laporan keuangan memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing BPR. Karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi: *understandability*, realibilitas, keterbandingan dan relevansi. Dengan adanya SAK ETAP diharapkan menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan BPR.

Berdasarkan hasil komparasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berkaitan dengan upaya untuk menjawab rumusan masalah tersebut diatas, yaitu antara lain :

1. Reklasifikasi provisi yang awalnya merupakan kewajiban menjadi aktiva yang mengurangi kredit diberikan. Hal ini memperkecil aset pada laporan keuangan BPR.
2. Beban pajak berisi beban pajak penghasilan (beban pajak fiskal) dan beban pajak tangguhan, namun dalam ETAP beban pajak tangguhan ditiadakan.
3. Bank harus mengungkapkan laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan, yang menerangkan perhitungan aset dan kewajiban. Namun pada PSAK No. 31 tidak dijelaskan secara rinci pos-pos yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitaria Mikha, 2010, *Bank Perkreditan Rakyat*, <http://H:/BPR/bank-perkreditan-rakyat-bpr-pengertian.html> (diakses tanggal 4 Februari 2011)
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat, *Menyibak Tabir Rahasia Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)*, Equity Laboratorium Akuntansi FE UMM, Edisi VIII/2010.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31. Ed. Per 1 Juli 2009*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Rahayu, Sari, 2010, *Kajian Atas Standar Pelaporan Keuangan Industri Perbankan : Komparasi IFRS dan SAK Indonesia*. FE UMM.
- Siamat, Dahlan, 2004, *Manajemen Lembaga Keuangan. Ed keempat*. Jakarta.
- Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga*, BPFE, Yogyakarta.
- Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia, 2010, *PA BPR Ed 1 2010*, Jakarta.